

KONTRIBUSI DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

(Analisis Data Cross - Section Tahun 2002)

Oleh:

Siti Parhah, S.Pd., M.S.E.

1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001. Menurut Robert A. Simanjuntak (2002) pada dasarnya desentralisasi fiskal di Indonesia mempunyai beberapa sasaran umum, yaitu : 1) untuk memenuhi aspirasi daerah menyangkut penguasaan atas sumber-sumber keuangan negara; 2) mendorong akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan daerah; 3) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; 4) mengurangi ketimpangan antar daerah; 5) menjamin terselenggaranya pelayanan publik minimum di setiap daerah; 6) meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berdasarkan sasaran-sasaran tersebut diharapkan bahwa dengan adanya desentralisasi fiskal dapat mendorong partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Selain itu desentralisasi fiskal dapat memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran dalam pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap.

Salah satu argumen dilakukannya desentralisasi fiskal adalah bahwa desentralisasi fiskal menyebabkan efisiensi dalam perekonomian, yaitu terjadinya efisiensi dalam alokasi sumber daya publik (Oates, 1972). Desentralisasi fiskal meningkatkan pendapatan dan meningkatkan efisiensi dalam sektor publik dan memotong defisit anggaran, serta menaikkan pertumbuhan ekonomi (Bird, 1993; Bird, Wallich, 1993; Bahl, Linn, 1992; Gramlich, 1993 dan Oates, 1993). Menurut Oates (1972) alasan bahwa desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi yaitu karena pemerintah lokal mempunyai posisi yang lebih baik daripada pemerintah pusat untuk menyalurkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh pemerintah lokal, yang selanjutnya efisiensi akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional.

Sedangkan menurut Vazquez dan McNab (2001) dua alasan mengenai efisiensi desentralisasi fiskal adalah, pertama, apabila pemerintah lokalnya cerdas dan mampu membaca keinginan konstituennya maka akan mudah dalam mengadaptasikan kebijakan

pengeluarannya, sehingga dengan hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan individu (*consumer efficiency*). Kedua, pembelanjaan dana di tingkat lokal akan mendorong "*producer efficiency*" akibat pelayanan yang lebih murah dalam penyediaan infrastruktur.

Di pihak lain Zang dan Zou (1998) menyatakan bahwa desentralisasi pengeluaran (pangsa pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah pusat) dan penerimaan (kapasitas fiskal daerah dari pemerintah pusat) adalah bagian dari upaya untuk memperbaiki efisiensi dari sektor publik, memotong anggaran defisit dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Alasannya, desentralisasi akan meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah daerah berada pada posisi yang lebih baik untuk memberikan jasa publik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah nasional. Seiring berjalannya waktu, efisiensi yang diperoleh akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi daerah bertambah cepat seperti halnya di tingkat nasional.

Berdasarkan kondisi faktual yang dialami Indonesia, dalam penerapan desentralisasi dan otonomi daerah penuh, maka perlu dicari tahu apakah desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk mengetahui hubungan antara desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah perlu diketahui ukuran desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salahsatu ukuran dari desentralisasi fiskal adalah meningkatnya pengeluaran pemerintah daerah relatif dibandingkan pemerintah pusat (Zang dan Zou, 1998). Semakin besar rasio pengeluaran pemerintah daerah dibandingkan pemerintah pusat menunjukkan tingkat desentralisasi yang semakin besar. Pengeluaran pemerintah daerah yang semakin besar tersebut secara implisit menunjukkan semakin besarnya investasi publik di masyarakat. Hal ini mengikuti pendapat Musgrave (1959) bahwa investasi publik diasumsikan memiliki dampak produktivitas langsung seperti halnya investasi swasta dalam perekonomian.

Timbul persoalan bagaimana pengaruh investasi publik tersebut terhadap proses pertumbuhan ekonomi daerah. Apakah ia mendorong secara signifikan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan ?

Ekonomi suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perdagangan antar daerah maupun dengan negara lain. Kegiatan perdagangan ini menunjukkan keterbukaan suatu perekonomian dengan perekonomian lainnya. Keterbukaan ini menunjukkan arus barang dan jasa yang semakin mudah. Semakin kuat arus barang dan jasa akan mendorong aktivitas ekonomi suatu daerah, dan ini berarti sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Levine dan Renelt (1992) mengemukakan bahwa semakin terbuka suatu daerah diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, namun dengan

syarat melalui kegiatan investasi. Jadi, semakin terbuka suatu daerah semakin besar pula akses untuk investasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Jin, 2000).

Sumber daya manusia juga berperan dalam ekonomi daerah dengan syarat jumlah dan kualitasnya semakin membaik. Beberapa penelitian menunjukkan hal tersebut, misalnya Frank Giarratani dan Soeroso (1985). Peranan keduanya semakin dipicu dari sector publik, yaitu dengan semakin besarnya kapasitas fiskal daerah yang memungkinkan terjadinya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

2. Literature Review

2.1. Teori Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal dapat dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan Musgrave dan pendekatan Neo Klasik (Simanjuntak, 1998). Secara umum pendekatan Musgravian menyatakan bahwa keberadaan sektor publik adalah untuk menjalankan beberapa fungsi pokok. Hal yang ingin dijawab dari pendekatan ini adalah pada tingkat pemerintahan yang mana yang sebaiknya fungsi tersebut dijalankan. Kriteria untuk mendesentralisasikan atau mensentralisasikan fungsi didasarkan pada dua kriteria, yaitu eksternalitas dan kepekaan preferensi. Berdasarkan dua kriteria tersebut, maka fungsi stabilisasi disentralisasikan, sedangkan fungsi alokasi dan distribusi dapat didesentralisasikan. Meskipun untuk fungsi distribusi terdapat peluang bagi pemerintah pusat untuk melakukannya.

Pendekatan Neo Klasik merupakan pendekatan ekonomi politik, yang ingin mencari tahu, dapatkah pemerintah daerah dianggap sebagaimana layaknya individu? Pendekatan klasik mendasarkan pada asumsi yang menganggap bahwa masyarakat lokal memiliki preferensi yang relatif homogen sebagaimana layaknya individu. Dari pendekatan ini dapat disimpulkan bahwa pilihan-pilihan pemerintah daerah lebih mendekati atau lebih sesuai dengan pilihan-pilihan individual ketimbang pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Pengambilan keputusan yang terdesentralisasikan akan bekerja lebih baik apabila preferensi itu bersifat homogen.

Kesimpulan di atas sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gramlich (1993) bahwa jasa publik seharusnya disediakan oleh tingkat pemerintahan yang serendah mungkin, atau daerah dengan batas administratif terkecil yang mendapatkan manfaat dari distribusi tersebut.

Menurut Bahl (1999), desentralisasi fiskal memiliki beberapa keuntungan : pertama dan paling penting adalah keuntungan dari perpindahan pemerintah yang lebih mendekati masyarakat. Argumen efisiensi ini yang mendorong pemikiran kebanyakan ahli ekonomi. Kedua, mobilisasi keseluruhan penerimaan dapat ditingkatkan karena desentralisasi dapat

memperluas objek pajak. Ketiga, jika desentralisasi fiskal telah cukup jauh berlangsung maka distribusi kota dalam ukuran yang lebih baik akan dihasilkan.

Implikasi dari sistem pemerintahan yang terdesentralisasi adalah belum tentu bahwa kesejahteraan sosial secara maksimum dapat dicapai. Hal ini berkait erat dengan bahaya yang ditimbulkan yaitu adanya persoalan biaya yang secara signifikan melekat di dalamnya, yaitu dalam hal keadilan distribusi dan manajemen makroekonomi.

2.2. Mengukur desentralisasi fiskal

Secara umum desentralisasi fiskal diinterpretasikan sebagai transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah lokal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan (Akai dan Sakata, 2002). Untuk mengukur desentralisasi fiskal, kita harus mengetahui derajat kewenangan pemerintah lokal dalam mengambil keputusan atau tingkat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan yang lebih rendah. Kewenangan berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam masalah pengalokasian yang berbasis pada hubungan legal antara tingkat pemerintahan yang lebih rendah dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Pendekatan standar untuk mengukur alokasi kewenangan adalah dengan menggunakan pengukuran penghitungan seperti pendapatan atau pengeluaran. Bagaimanapun terdapat beberapa cara untuk mendapatkan ukuran yang tepat dalam alokasi kewenangan.

Pertama, pengeluaran pemerintah tingkat rendah bisa saja dibiayai oleh pemerintahan yang lebih tinggi. Pembagian pengeluaran ini dalam total anggaran tidak dengan sendirinya merefleksikan tingkat alokasi kewenangan kepada pemerintahan yang lebih rendah karena, dalam arti lebih luas, pemberian ini dianggap pengeluaran yang diizinkan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Adalah tidak tepat untuk menganggap pembagian pengeluaran sebagai sesuatu yang penting dalam mengukur pembagian kewenangan. Hal ini terjadi karena pembagian kewenangan selalu diasosiasikan dengan pengeluaran biaya yang diberikan pada pemerintahan yang lebih rendah.

Kedua, jika pembagian pengeluaran atau pendapatan kecil, maka kewenangan fiskal menjadi terdesentralisasi untuk menyediakan sumber daya bagi belanja publik yang asli dialokasikan kepada pemerintah tingkat bawah, dengan hal tersebut maka otonomi tercapai.

Beberapa penelitian lazimnya mengukur desentralisasi fiskal dari pembagian alokasi pengeluaran dan pendapatan pemerintah lokal dengan pemerintah pusat (Vazquest dan McNab, 2001).

2.3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Secara umum, pertumbuhan ekonomi suatu perekonomian dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut menurut Nafziger (1997) adalah : penduduk (tenaga kerja), tingkat pendidikan, pembentukan modal (investasi dan perkembangan teknologi), kewirausahaan (inovasi) dan sumber daya alam.

Pertumbuhan penduduk akan mendorong pertumbuhan tenaga kerja, semakin besar jumlah tenaga kerja akan meningkatkan jumlah output yang dihasilkan di dalam perekonomian. Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang selalu dipakai dalam proses produksi perannya dipengaruhi oleh keterampilan, tingkat pendidikan, dan daya kreasi yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Semakin tinggi tenaga kerja tersebut memiliki kemampuan itu, maka akan cenderung meningkatkan produktivitasnya. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dalam bentuk meningkatnya output yang dihasilkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tingkat pendidikan penduduk / tenaga kerja adalah faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang lain. Menurut Kuznets sebagian besar stok dari negara-negara maju secara ekonomi bukanlah modal fisik, tetapi justru ada pada manusia yang berpengetahuan dan terlatih yang menggunakannya secara efektif. Hal ini juga yang membedakan tingkat pertumbuhan antara negara maju dan negara sedang berkembang.

Menurut Armstrong (1993), ada dua pendekatan besar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pendekatan pertama adalah pendekatan sisi penawaran (*supply side*) seperti model Neo Klasik. Penekanan dari model Neo Klasik adalah menekankan pengaruh dari faktor-faktor penawaran mendasar seperti misalnya pertumbuhan angkatan kerja, pertumbuhan stok modal dan perubahan teknologi. Sedangkan pendekatan kedua adalah pendekatan dari sisi permintaan (*demand side*) seperti model Export-Led. Model ini menekankan pentingnya permintaan eksternal terhadap pertumbuhan suatu daerah.

2.4. Studi Empiris mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi

Beberapa penelitian mencoba menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari beberapa studi tersebut tidak satupun yang berhasil dalam memverifikasi kontribusi potensial desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, Zhang dan Zou (1998), dengan menggunakan data panel China pada periode tahun 1970, menemukan bahwa desentralisasi fiskal mengurangi pertumbuhan ekonomi provinsi.

Kedua, Davoodi dan Zou (1998), dengan menggunakan data panel 46 negara sedang berkembang dan negara sudah berkembang pada periode 1970-1989, menemukan hubungan

negatif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang, dan tidak terdapat hubungan di negara yang sudah berkembang (negara maju).

Terakhir, Xie et all (1999), dengan menggunakan data time series United States pada periode 1948-1994, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal mungkin mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Berikut ini studi lengkap Zhang dan Zou serta penelitian Akai dan Akata mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

2.4.1. Studi Zhang dan Zou

Dalam studinya Zhang dan Zou mengeksplorasi bagaimana alokasi sumber daya fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal di China berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 1970-an.

Dalam studinya tersebut *explanatory variable* yang diajukan mempunyai empat kategori, yaitu :

1. Input produksi, termasuk investasi dan angkatan kerja
2. Mengukur pengeluaran desentralisasi fiskal
3. Mengukur komposisi anggaran pengeluaran pusat dan provinsi
4. Variable lain, seperti tingkat pajak, perdagangan luar negeri, dan tingkat inflasi.

Model yang digunakan adalah :

$$Y_{st} = \beta M_{st} + \beta_n N_{st} + \beta DC_{st} + u_{st}$$

Dimana :

- s mengindikasikan provinsi, dan t mengindikasikan tahun
- M_{st} adalah set variable yang selalu termasuk dalam regresi
- N_{st} adalah subset variable yang diidentifikasi oleh literature sebagai variabel penjelas penting yang potensial mengenai pertumbuhan ekonomi
- DC_{st} dinotasikan sebagai variable of interest
- u_{st} adalah error term

Variable M mengandung tingkat pertumbuhan angkatan kerja (L) dan tingkat pajak (CT dan PT). Variable N terdiri dari derajat keterbukaan (F), tingkat inflasi (R), dan tingkat investasi (I).

Satu catatan penting yang dikemukakan oleh Zhang dan Zou adalah jika pembagian lokal dalam total pendapatan dan pengeluaran fiskal tinggi, maka mungkin desentralisasi menghasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

2.4.2. Studi Akai dan Sakata

Untuk mengukur desentralisasi fiskal Akai dan Sakata (2002) menggunakan beberapa indikator, yaitu :

1. Revenue indicator
2. Production indicator
3. Autonomy indicator
4. Production-revenue indicator

Sedangkan model empirisnya adalah :

$$\Delta \text{GSP}_i = \alpha_0 + \alpha_1 \text{decentralization}_i + X_i \beta + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, 50$$

Dimana :

ΔGSP_i : average annual growth rate of per capita gross state product (GSP) antara tahun 1992 dan 1996

$\text{Decentralization}_i$: indikator desentralisasi fiskal di *state* i

X_i : variabel kontrol

α_0 dan α_1 : skalar

β : vektor parameter

ε_i : *error term*, yang diasumsikan berdistribusi normal, homoskedastis, dan independent antar observasi.

Estimasi dilakukan dengan menggunakan metode Ordinary Least square (OLS) dengan menggunakan data cross section United States. Titik berat dari studi mereka adalah mencoba menemukan pengukuran desentralisasi fiskal yang akurat sehingga dapat mengestimasi secara benar mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hasil dari studi mereka menemukan bahwa definisi desentralisasi fiskal memegang peranan penting untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Vazquez dan McNab (2001) studi empiris mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya semata-mata meneliti mengenai pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, justru bagaimana meneliti mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap komponen dasar pertumbuhan ekonomi seperti kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

3. Analisis Empiris

Model analisis untuk mengetahui hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi akan mengikuti model Akai dan Sakata, dimana persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$\Delta\text{GSP}_i = \alpha_0 + \alpha_1 \text{Decentralization}_i + X_i\beta + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, 30$$

dimana i menunjukkan propinsi i ; ΔGSP_i merepresentasikan rata-rata tingkat pertumbuhan PRDB per kapita antara tahun 2002 dan 2003; $\text{Decentralization}_i$ merepresentasikan indikator desentralisasi fiskal di propinsi i ; X_i adalah kontrol variabel. Parameter α_0 dan α_1 adalah scalar, β adalah parameter vektor, dan ε_i adalah *error term*, yang diasumsikan berdistribusi normal, homoskedastis, dan independen diantara observasi. Persamaan tersebut akan diestimasi dengan menggunakan metode *ordinary least square* (OLS) dengan menggunakan dat cross-section.

3.1. Variabel

Variabel yang digunakan dalam analisis akan menggunakan variabel yang dipakai oleh Akai dan Sakata. Tetapi karena adanya keterbatasan data dan perbedaan kondisi antara United States dengan Indonesia, maka variable LIB (liberal) vs. CON (konservatif) serta PATENT tidak digunakan. Untuk indikator desentralisasi fiskal sepenuhnya penelitian ini menggunakan indikator yang dipakai oleh Akai dan Sakata. Berikut ini variabel dan definisi variabel yang digunakan dalam analisis.

Tabel 1
Variabel dan Definisi Variabel

Variabel	Definisi
ΔGSP	Rata-rata tahunan tingkat pertumbuhan PDRB per kapita antara 2002-2003
POP	Laju pertumbuhan penduduk propinsi tahun 2002
$\Delta\text{GSP}(-1)$	Rata-rata tahunan tingkat pertumbuhan PDRB per kapita antara 2001 – 2002
EDUC	Persentase partisipasi sekolah umur 19-24 tahun pada tahun 2002
GINI	Koefisien Gini propinsi tahun 2002
OPENNESS	Rasio ekspor ditambah impor terhadap PDRB tahun 2002
Indikator Desentralisasi Fiskal	
RI	Rasio penerimaan pemerintah propinsi terhadap penerimaan pemerintah pusat tahun 2002
PI	Rasio pengeluaran pemerintah propinsi terhadap pengeluaran pemerintah pusat tahun 2002
AI	Rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan

	propinsi tahun 2002
PRI	$(PI + RI)/2$, yang merefleksikan aspek penerimaan dan pengeluaran desentralisasi fiskal tahun 2002

Variable EDUC dimasukan sebagai *control variable* untuk mengukur tingkat human capital. Sedangkan untuk mengukur efek distribusi pendapatan digunakan koefisien Gini, dan untuk mengukur struktur perekonomian digunakan variabel OPENNESS.

Prediksi yang dapat dinyatakan mengenai pengaruh beberapa variabel adalah sebagai berikut. Pertama, ketika beberapa model sering menyarankan bahwa peningkatan populasi mempertinggi pertumbuhan ekonomi, maka pengaruh POP terhadap pertumbuhan GSP diharapkan positif. Kedua, ketika tingkat pendidikan yang lebih tinggi memungkinkan meningkatkan aktivitas ekonomi, maka efek EDUC terhadap pertumbuhan GSP diharapkan positif. Ketiga, ketika tingkat kesenjangan pendapatan tinggi memerlukan distribusi pendapatan antar *region* dan memungkinkan mengurangi insentif untuk bekerja, maka ekspektasi pengaruh GINI terhadap pertumbuhan GSP menjadi negatif.

Data yang digunakan untuk menganalisis diperoleh dari Badan Pusat Statitik (BPS) dan Departemen Keuangan. Seharusnya data yang digunakan untuk menganalisis adalah data Kabupaten, namun karena beberapa variabel menyediakan data sampai tingkat propinsi maka data kabupaten yang ada dilakukan agregasi. Data yang mengalami agregasi adalah data realisasi APBD kabupaten.

4. Hasil Regresi

Berdasarkan hasil regresi diketahui bahwa semua indikator desentralisasi fiskal yang dijadikan variabel independen semuanya tidak signifikan. Ini menunjukkan bahwa masih lemahnya tingkat desentralisasi fiskal di Indonesia. Tidak signifikannya indikator desentralisasi fiskal juga dipicu oleh penggunaan data tahun 2002, dimana desentralisasi baru dilaksanakan pada tahun 2001, sehingga belum mampu menunjukkan implikasinya.

Dilihat dari variasi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen diketahui bahwa semua indikator hanya mampu menjelaskan sebesar 64 %. Walaupun demikian, ketika semua indikator dilakukan pengajuan secara bersama-sama diketahui bahwa jika variabel independen tersebut diuji secara serentak menunjukkan signifikansinya pada derajat kepercayaan 1 %. Karena metode yang digunakan untuk menganalisis adalah metode OLS, maka dilakukan pengujian asumsi klasik. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa model bebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Dengan menggunakan uji t pada indikator RI, PI, AI, dan PRI diketahui bahwa variable yang signifikan hanya POP, Δ GSP(-1) , dan Openness. Masing-masing signifikan pada derajat kepercayaan 10 %, 1%, dan 5%.

Dari hasil pengujian regresi diketahui pula bahwa RI, PI, AI, dan PRI mempunyai hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Negatifnya hubungan ini menjelaskan bahwa *share* pemerintah pusat terhadap pemerintah propinsi masih sangat besar. Hal ini menunjukkan pula bahwa dari sisi fiskal kabupaten-kabupaten di Indonesia belum terdesentralisasi.

Variabel EDU secara statistik tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, walaupun mempunyai hubungan yang positif. Tidak signifikannya variabel ini menjelaskan bahwa EDU merupakan proxi yang lemah untuk menjelaskan kualitas *human capital*.

Δ GSP(-1) sebagai variabel kontrol mempunyai hubungan positif dan signifikan secara statistik mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa pertumbuhan pada periode sebelumnya merupakan determinan penting terhadap pertumbuhan ekonomi pada saat ini.

Variabel GINI menunjukkan hubungan yang negatif, sebagaimana yang diharapkan, dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa ketidakmerataan pendapatan yang diproksi dengan Gini ratio akan mengurangi pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil regresi, variabel POP mempunyai hubungan yang negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjelaskan bahwa kalau hanya jumlah penduduk, bukan kualitas penduduk yang dijadikan ukuran, akan menjadi beban pembangunan.

Variabel OPENNESS mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa derajat keterbukaan mempunyai hubungan positif dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin tinggi derajat keterbukaan suatu perekonomian, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

5. Kesimpulan

Studi ini menunjukkan bahwa untuk tahun 2002, kontribusi desentralisasi fiskal di Indonesia belum mempunyai dampak yang berarti. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat desentralisasi fiskal baru dilaksanakan pada tahun 2001. Studi ini pun menjelaskan bahwa indikator desentralisasi fiskal yang diajukan oleh Akai dan Sakata belum mampu menjelaskan kondisi desentralisasi fiskal di Indonesia. Hasil studi ini mengkonfirmasi penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Akai, Nobuo., and Masayo Sakata, 2002, *Fiscal Decentralization Contributes to Economic Growth: Evidence from State-Level Cross-Section Data for the United States*. Journal of Urban Economics 52, pp 93-108
- Bahl, R.W., Linn, J., 1992. *Urban Public Finance in Developing Countries*. New York, Oxford University Press.
- Bird, R.M., Wallich, C., 1993. *Fiscal Decentralization and Intergovernmental Relations in Transition Economics : Towards a Systematic Framework of Analysis*. Country Economics Departement Working Paper, World Bank, Washington DC.
- Bird, R.M., 1993. *Threading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization*. National Tax Journal XLVI (2), 202-227.
- Gramlich, E.M., 1993. *A Policy Maker,s Guide to Fiscal Decentralization*. National Tax Journal XLVI (2), 229-235.
- Davoodi, H. and H. Zou, 1998. *Fiscal Decentralization and Economics Growth: A Cross Country Study*, Journal of Urban Economis 43, 224-257.
- Oates, W.E.,1972. *Fiscal Federalism*, New York, Harcourt Brace Javanovic
- Oates, W.E.,1993. *Fiscal Decentralization and Economics Development*, National Tax Journal 46, 237-243.
- Xie, D., H. Zou, and H. Davoodi, 1999. in *Fiscal Decentralization and Economics Growth the United States*, Journal of Urban Economis 45, 228-239.
- Zhang, T and H. Zou, 1998. *Fiscal Decentralization, Public spending, and Economics Growth in China*, Journal of Public Economis 67, 221-240.
- Vazquez, Jorge Martinez., dan Robert M. McNab, 2001. *Fiscal Decentralization and Economic Growth*, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University, Atlanta, Georgia.
- Jin, Jang C., 2000, *Openness and Growth : An Interpretation of Empirical Evidence from East Asian Countries*, Journal of International Trade and Economic Development 9:1 5-17.
- Levine, R dan Renelt, D.A., 1992, *Sensitivity Anaysis of Cross Country Growth Regression*, American Economic Review, 82, pp 942-963

- Musgrave, Richard A., 1959, *The Theory of Public Finance : A Study in Public Economy*, New York, McGraw Hill.
- Giarratani, Frank dan Soeroso, 1985, *A Neoclassical Model of Regional Growth in Indonesia*, Journal of Regional Science, Vol. 25, No. 3
- Simanjuntak, R., 1998, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, Sumbangan Pemikiran FE-UI pada Reformasi dan Pemulihan Ekonomi*, Jakarta, LPEM-UI
- Bahl, Roy W., 1998, *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*, Georgia, Georgia State University.
- Gramlich, Edward M. A., 1993, *Policymaker's Guide to Fiscal Decentralization*, National Tax Journal, Vol. XLVI, No. 2 : 229-235
- Nafziger, E. Wayne., 1997, *The Economics of Developing Countries*, New Jersey, Prentice Hall International Inc.
- Amstrong, Harvey and Jim Taylor, 1993, *Regional Economics and Policy*, New York, Harvester Wheatsheaf.
- Simanjuntak, R., 2002, *Enambelas Bulan Perjalanan Desentralisasi Fiskal di Indonesia, dalam 80 Tahun Mohamad Sadli : Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru*, Jakarta, Kompas.

Lampiran

Dependent Variable: Δ GSP
 Method: Least Squares
 Date: 01/04/06 Time: 14:57
 Sample: 1 30
 Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1,300690	3,882625	-0,335003	0,740700
RI	-241,762500	291,315800	-0,829899	0,415100
EDUC	0,095749	0,066257	1,445115	0,161900
GINI	-2,430156	13,420000	-0,181085	0,857900
Δ GSP(-1)	0,778018	0,104642	7,435043	0,000000
POP	-0,087167	0,047798	-1,823675	0,081200
OPENNESS	0,026731	0,012777	2,092112	0,047700
R-squared	0,720013	Mean dependent var		9,949667
Adjusted R-squared	0,646973	S.D. dependent var		3,294698
S.E. of regression	1,957581	Akaike info criterion		4,382260
Sum squared resid	88,138870	Schwarz criterion		4,709206
Log likelihood	-58,733900	F-statistic		9,857770
Durbin-Watson stat	1,864848	Prob(F-statistic)		0,000020

Dependent Variable: Δ GSP
 Method: Least Squares
 Date: 01/04/06 Time: 15:00
 Sample: 1 30
 Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1,266069	3,893082	-0,325210	0,748000
PI	-272,428800	345,100200	-0,789419	0,437900
EDUC	0,094848	0,066597	1,424217	0,167800
GINI	-2,408466	13,533010	-0,177970	0,860300
Δ GSP(-1)	0,776701	0,104687	7,419265	0,000000
POP	-0,087834	0,047963	-1,831276	0,080000
OPENNESS	0,026306	0,012691	2,072919	0,049600
R-squared	0,719236	Mean dependent var		9,949667
Adjusted R-squared	0,645993	S.D. dependent var		3,294698
S.E. of regression	1,960295	Akaike info criterion		4,385031
Sum squared resid	88,383430	Schwarz criterion		4,711977
Log likelihood	-58,775460	F-statistic		9,819886
Durbin-Watson stat	1,866707	Prob(F-statistic)		0,000021

Dependent
Variable: Δ GSP

Method: Least
Squares

Date: 01/04/06

Time: 15:01

Sample: 1 30

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1,995732	4,415899	-0,451942	0,655500
AI	-0,044311	0,062780	-0,705816	0,487400
EDUC	0,110738	0,066633	1,661905	0,110100
GINI	-1,585950	14,302100	-0,110889	0,912700
Δ GSP(-1)	0,825091	0,130287	6,332875	0,000000
POP	-0,094018	0,049954	-1,882105	0,072500
OPENNESS	0,025367	0,012482	2,032203	0,053800
R-squared	0,717742	Mean dependent var		9,949667
Adjusted R-squared	0,644110	S.D. dependent var		3,294698
S.E. of regression	1,965503	Akaike info criterion		4,390337
Sum squared resid	88,853620	Schwarz criterion		4,717283
Log likelihood	-58,855050	F-statistic		9,747638
Durbin-Watson stat	1,946576	Prob(F-statistic)		0,000022

Dependent Variable: Δ GSP

Method: Least Squares

Date: 01/04/06 Time: 15:03

Sample: 1 30

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1,285241	3,887508	-0,330608	0,743900
PRI	-256,546900	316,184700	-0,811383	0,425500
EDUC	0,095287	0,066415	1,434727	0,164800
GINI	-2,417645	13,471190	-0,179468	0,859100
Δ GSP(-1)	0,777422	0,104664	7,427814	0,000000
POP	-0,087498	0,047873	-1,827720	0,080600
OPENNESS	0,026542	0,012740	2,083370	0,048500
R-squared	0,719653	Mean dependent var		9,949667
Adjusted R-squared	0,646519	S.D. dependent var		3,294698
S.E. of regression	1,958838	Akaike info criterion		4,383544
Sum squared resid	88,252080	Schwarz criterion		4,710490
Log likelihood	-58,753150	F-statistic		9,840207
Durbin-Watson stat	1,865330	Prob(F-statistic)		0,000021

UJI AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0,323889	Probability	0,72688
Obs*R-squared	0,897705	Probability	0,63836

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/04/06 Time: 17:32

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,281101	4,148164	-0,067765	0,9466
RI	-31,26339	303,3017	-0,103077	0,9189
EDUC	0,015109	0,07219	0,209292	0,8362
GINI	-1,250018	14,37976	-0,086929	0,9316
ΔGSP(-1)	-0,007857	0,109038	-0,072054	0,9432
POP	-0,008206	0,051055	-0,160734	0,8738
OPENNESS	0,007694	0,016283	0,472544	0,6414
RESID(-1)	0,037018	0,232972	0,158897	0,8753
RESID(-2)	-0,230893	0,288006	-0,801695	0,4317
R-squared	0,029924	Mean dependent var	-2,07E-16	
Adjusted R-squared	-0,339629	S.D. dependent var	1,743351	
S.E. of regression	2,017795	Akaike info criterion	4,485213	
Sum squared resid	85,50144	Schwarz criterion	4,905572	
Log likelihood	-58,27819	F-statistic	0,080972	
Durbin-Watson stat	2,028146	Prob(F-statistic)	0,999459	

UJI HETEROSKEDASTISITAS

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0,979914	Probability	0,502567
Obs*R-squared	12,2664	Probability	0,424529

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/04/06 Time: 17:36

Sample: 1 30

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37,74147	85,89115	0,43941	0,6659
RI	713,2769	3262,493	0,218629	0,8295
RI^2	-136132,5	554056,8	-0,245701	0,8089
EDUC	-0,996623	0,609484	-1,635191	0,1204
EDUC^2	0,022011	0,015747	1,397765	0,1802
GINI	-122,9327	612,5805	-0,20068	0,8433
GINI^2	149,039	1053,209	0,141509	0,8891
Δ GSP(-1)	-0,396265	1,435178	-0,276109	0,7858
Δ GSP(-1)^2	0,015359	0,068914	0,222867	0,8263
POP	-0,246674	0,197469	-1,249175	0,2285
POP^2	-0,014519	0,009683	-1,499481	0,1521
OPENNESS	-0,124114	0,121626	-1,020452	0,3218
OPENNESS^2	0,001093	0,000708	1,544083	0,141
R-squared	0,40888	Mean dependent var		2,937962
Adjusted R-squared	-0,008381	S.D. dependent var		4,47133
S.E. of regression	4,490028	Akaike info criterion		6,140278
Sum squared resid	342,726	Schwarz criterion		6,747463
Log likelihood	-79,10416	F-statistic		0,979914
Durbin-Watson stat	1,962558	Prob(F-statistic)		0,502567